

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 Standar Nasional Pendidikan, diberikan wewenang kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya dan dengan adanya tuntutan globalisasi yang ditujukan terutama bagi anak didik yang duduk di bangku SMA. Hal ini ditujukan agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju (Kunandar, 2007:13). Pendidikan Politik bagi generasi muda merupakan hal yang penting, sebab dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan interaksi sesama masyarakat. Untuk itu perlu memahami bagaimana mengoptimalkan upaya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara melalui interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat maupun sebagai pelajar yang masih sekolah. Pendidikan di sekolah sangat mempunyai peranan dalam mensosialisasikan melalui pembelajaran terhadap anak didik untuk dapat berinteraksi dengan baik dikalangan masyarakat, serta sosialisasi bagaimana memahami tatanan kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UUD 1945.

Di dunia Pendidikan Indonesia, terdapat pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Materi pembelajarannya sangat terkait dengan nilai-nilai Pancasila, aturan bernegara dan perundang-undangan, isu kebangsaan, hukum dan pemerintahan. Namun kemampuan agar anak didik memahami dengan baik materi ajar tersebut sangat tergantung pada kemampuan Guru sebagai pendidik mengelola pembelajaran di ruang kelas. Para pendidik harus menjadi pelopor dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. Radikalisme, sebaran berita penuh kebencian atau hoax dan polarisasi akibat pilihan politik dalam pilkada, pileg dan pilpres yang semakin menjadi-jadi harus menjadi perhatian para Guru PPKn untuk meningkatkan gairah kebangsaan bagi penguatan kebinnekaan para siswa. Untuk

itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa (Pradhanawati, 2009:214).

Mata pelajaran PPKn merupakan kajian interdisiplin, artinya materi keilmuan Kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain Ilmu Politik, Ilmu Negara, Ilmu Hukum, Moral dan Ilmu Filsafat. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik, dapat menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Politik bertujuan untuk mewujudkan atau menyiapkan generasi penerus untuk memenuhi harapan masyarakat luas dalam perjuangan cita-cita Bangsa dan Negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan Pendidikan Politik melalui pembelajaran PPKn, siswa dapat membiasakan diri dalam membahas tema-tema tentang politik, baik politik nasional maupun politik lokal dengan sopan dan santun. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur Pendidikan Sekolah/formal merupakan jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang (pasal 1 ayat 10), maka Sekolah bertugas mendidik dan mengajar serta memperbaiki tingkah laku anak didik yang terbawa-bawa dari keluarga masing-masing ke sekolah.

Guru selaku pendidik mempunyai peranan yang sangat penting dan fundamental didalam proses sosialisasi Politik pada peserta didik, melalui proses pembelajaran materi PPKn dikelas. Guru harus mampu membantu anak didiknya menjadi makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan baik didalam masyarakat, menjadi warga negara yang baik serta mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Guru sebagai sarana pencapaian target kurikulum yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan sebelumnya dengan berstandar pada kompetensi, kompetensi dasar dan indikator alat ukur pencapaian. Guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugas sebagai pengembang kurikulum berdasarkan ruang dan waktu yang tersedia untuk memodifikasi kurikulum yang berorientasi pada civic society dan kreatif tanpa mengurangi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Peranan Guru dalam mensosialisasikan politik bagi anak didik sangat penting bagi upaya untuk pengembangan budaya Politik, sebagai kesadaran dalam berpolitik sehingga remaja diharapkan dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menghadirkan pembelajaran PPKn yang inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan di kelas bagi anak didik menjadi tantangan tersendiri bagi para Guru pengampu PPKn. Materi kurikulum PPKn sudah diajarkan mulai dari bangku Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) bahkan Perguruan Tinggi, namun kenyataannya masyarakat Indonesia belum bisa menunjukkan karakter yang sepadan dengan materi PPKn yang telah dipelajari selama mengenyam Pendidikan di bangku Sekolah. Hal ini terbukti realitas politik justru menampilkan lakon Pendidikan Politik yang masih jauh dari akal sehat. Hiruk pikuk Politik dinegeri ini belum menampilkan wajah Politik santun yang memberikan rasa aman dan damai. Hal tersebut tentu akan mengurangi rangsangan bagi siswa untuk lebih memahami konsep demokrasi sehingga dalam pelaksanaannya baik di pilkada, pileg dan pilpres kurang berpartisipasi.

Tentu saja bukan perkara mudah bagi Guru PPKn, tapi harus mampu menyikapi dan perlu diupayakan agar menjadi bagian penting sebagai bahan evaluasi. Mengkontruksikan hal tersebut bukan pekerjaan mudah namun memerlukan proses panjang. Pembelajaran PPKn diruang kelas masih lebih mengedepankan bersifat normatif dan dogmatif, ketika Guru dianggap pemegang kunci kebijaksanaan dan suara siswa tidak begitu diperhatikan sehingga materi yang disampaikan kurang diminati anak didik.

Pendekatan pembelajaran cara baru perlu diperhatikan demi Indonesia yang lebih maju dari segi demokratis. Hal ini dapat dilakukan dengan selalu membuka ruang untuk diskusi kelas bagi anak didik yang berhubungan dengan karakter sebagai Warga Negara yang mempunyai hak dan tanggung jawab Politik dalam berbangsa dan bernegara. Anak didik dapat dibentuk dalam kelompok diskusi, dimana setiap kelompok diharuskan menyusun beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi pemahaman tentang Politik. Kelompok pertama akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang kedua, lalu kelompok dua akan menjawab. kemudian kelompok yang kedua akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok yang berikutnya, dan kelompok tersebut akan menjawabnya. Demikian seterusnya.

Kartono (2009) pendidikan politik di sekolah melalui pembelajaran PPKn adalah mengajarkan manusia untuk mampu mengembangkan bakat dan kemampuan kognitif, afektif, maupun psikomotorik yang ada dalam setiap individu supaya bisa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan politik dan menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fajar (2010) pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn (*citizenship education*) dilaksanakan untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk semua jalur dan jenjang pendidikan termasuk kecerdasan politik siswa perlu ditumbuh kembangkan sebagai bagian persiapan untuk melaksanakan kegiatan politik di kemudian harinya. Djahiri (2006) pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn adalah suatu proses penanaman nilai-nilai moral politik pada peserta didik dan nilai-nilai moral politik tersebut terintegrasi dalam ideologi Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial. Hermawan (2007) pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn pada siswa adalah bentuk pengajaran politik agar dapat menjadi warga negara yang mampu bersikap, berbuat dan bertanggung jawab dalam bidang politik, khususnya mampu menerapkan norma moral politik dalam kehidupan harian di sekolah, rumah dan masyarakat, juga membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, memiliki pengetahuan yang luas, cinta tanah air, berbudi luhur, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan bangsa.

Tujuan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn di SMA Harvard School Martubung adalah supaya siswa-siswi memahami tentang politik, mengetahui proses politik dan pada saat berusia 17 tahun dapat melaksanakan kegiatan politik seperti mengikuti pemilihan umum legislatif dan eksekutif, membentuk kesadaran siswa sebagai warga negara yang sadar akan dinamika politik kenegaraan. Wardani, (2018) tujuan pendidikan politik di sekolah yaitu siswa-siswi memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nataraharja (2012) mempertegas tujuan pendidikan politik melalui pembelajaran PPKn di SMA adalah membentuk kompetensi kewarganegaraan siswa, yang terdiri dari *civic knowlegde* (pengetahuan kewarganegaraan), dan *civic skills* (kecakapan berpikir kritis, rasional, kreatif dan siswa), kecakapan berpartisipasi dan bertanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suharyanto, A. (2016) tujuan pendidikan politik di sekolah melalui pembelajaran PPKn adalah membentuk perilaku politik siswa yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, melatih siswa-siswi menjadi warga negara yang baik yaitu dapat menjalankan fungsi politik seperti kerjasama, bermusyawarah, toleran dan loyal terhadap bangsa dan negara, ,mengembangkan semua bakat dan kemampuan siswa seperti aspek kognitif, kritis, sikap positif, keterampilan politik, dan membuat peserta didik berani bertanggungjawab serta giat dalam belajar demi mencapai masa depannya.

Berdasarkan wawancara saya dengan Kepala Sekolah, Ibu Roma Pasaribu, SP.d bahwa: Peranan Guru PPKn dalam Pendidikan Politik Siswa SMA Harvard School Martubung Medan Labuhan sudah sangat berperan hal ini dapat dilihat dari berbagai perhatian (misalnya: menerapkan pembelajaran bermain sambil belajar kepada Siswa, menggunakan media pembelajaran kepada Siswa, pemberian reward kepada Siswa), Keseriusan Guru dalam membina (misalnya: Guru membina Siswanya untuk mematuhi peraturan yang ada disekolah), memberikan keteladanan (misalnya: Siswa itu pintar didalam kelas otomatis Siswa itu akan dicontoh oleh Siswa yang lainnya didalam kelas), pemahaman tentang Kewarganegaraan dalam

pembelajaran di kelas (misalnya: seorang Guru mengetahui pemahaman tentang apa itu Kewarganegaraan dalam Pembelajaran PPKn didalam kelas).

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik melakukan penelitian tentang Peranan Guru PPKn dalam pembelajaran Pendidikan Politik bagi siswa setingkat SMA, maka judul penelitian adalah “Peranan Guru PPKn Dalam Pendidikan Politik pada Siswa SMA Swasta Yayasan Harvard School Di Martubung Medan Labuhan”.

1.2. Batasan Masalah

Pembatasan Masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan-batasan masalah penelitian yang akan diteliti. Terkait dengan latar belakang diatas, maka dalam Penelitian ini Penulis hanya memfokuskan pada Peranan Guru dalam Pendidikan Politik pada siswa SMA saja.

1.3. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini mencapai sasaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka penulis merasa perlu untuk merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah: “bagaimana peranan guru PPKn dalam pendidikan politik bagi siswa di SMA Harvard School Martubung Medan Labuhan”.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Guru PPKn dalam Pendidikan Politik pada siswa SMA Yayasan Pendidikan Harvard School Martubung Medan Labuhan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Politik di Sekolah dan Masyarakat. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai salah satu sumber bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak pemangku kepentingan dimasa yang akan datang khususnya bagi para siswa SMA sehingga perilaku Politik yang cerdas, dan rasional.